

BERJAYANYA BAHASA
INDONESIA “DI RUMAH SENDIRI”
MELALUI POLITIK BAHASA

Defina
(Departemen IKK, FEMA, IPB)
defina@ipb.ac.id;
defina@apps.ipb.ac.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan Ayat 1, Pasal 44, Bab III, UU No 24 Tahun 2009, yang berbunyi: “Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan”, diperlukan langkah-langkah dalam mewujudkannya. Pada bagian Penjelasan atas UU No 24 Tahun 2009 dijelaskan: “Yang dimaksud ‘bahasa internasional’ adalah bahasa yang digunakan sebagai komunikasi antarbangsa.”

Diperlukan politik bahasa. Warami *et al* (2014: 1-11) yang mengutip Lapoliwa (2011: 202) mengatakan bahwa politik bahasa nasional pada dasarnya didasarkan pada visi bahasa yang ada di dalam negeri, dalam hal ini BI, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Tujuan khususnya adalah menjelaskan 1) politik BI di antara bahasa daerah dan asing; 2) politik BI di era glocalisasi dan MEA; 3) dampak politik BI di era glocalisasi dan MEA; 4) politik bahasa negara anggota MEA.

METODE PENELITIAN

Metode: kajian pustaka, yakni dengan menggunakan studi literatur baik secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan) (Fahrurrozi dan Wicaksono (2017: 126), Chang (2014:29), dan Bungin (2012: 110). Sumber data: teori dan informasi berupa berita di Koran, daring dan luring.

PEMBAHASAN

1. Politik bahasa Indonesia di antara bahasa daerah dan bahasa asing

Di negara-negara multibahasa lainnya, seperti China, Philipina, dan Indonesia, yang populasinya besar dan berbicara dengan ratusan bahasa yang berbeda, bahasa nasional tidak hanya berfungsi sebagai *lingua franca*, tetapi juga bahasa resmi yang menjadi pemersatu secara simbolis bagi bangsa-bangsa ini. (Holmes, 2013: 106)

Bahasa daerah di Indonesia dilestarikan dan dijadikan salah satu mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Kosakata bahasa daerah sudah banyak yang dimuat dalam KBBI V. Contoh, kata *gelis* dari Sunda tidak ada pada KBBI Edisi III (2000), pada Edisi IV dan pada Edisi V sudah ada. Kata blusuk dari Jawa tidak ada pada KBBI Edisi III (2002) dan Edisi IV (2008), pada Edisi V sudah ada. Kata *cido* dari Minangkabau tidak ada pada KBBI Edisi III (2002), pada Edisi IV (2008), dan Edisi V sudah ada.

Kondisi yang ada:

- 1) Perda Jabar No. 14/2014 tentang Perubahan Perda Jabar No. 5/2003 tentang Pemeliharaan BSA Daerah, pasal 7a ayat 2 yang berbunyi: “(2) Perlindungan bahasa daerah dilakukan melalui: a. pendidikan; b. penggalian potensi bahasa; c. pengaksaraan; d. pendataan; e. pendaftaran; f. revitalisasi penggunaan bahasa daerah; g. pendokumentasian; dan publikasi.”
- 2) Perda No. 8/2017 tentang Pengutamaan BI dan Pelindungan BSD Sumut. “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan/gedung,dll.” (Tempo.co, 26 Oktober 2017)
- 3) Bahasa Inggris diberikan pada tingkat SLTP sampai perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, mata kuliah Bahasa Inggris adalah mata kuliah umum dan wajib. Sks mata kuliah ini adalah 3 sks. Sks mata kuliah Bahasa Inggris lebih banyak

daripada sks mata kuliah Bahasa Indonesia (2 sks).

- 4) Hasil penelitian Krishandini dan Defina (2013: 217-227) penggunaan nama daerah atau tempat dengan bahasa asing, seperti bahasa Inggris ditanggapi oleh masyarakat adalah suatu hal yang wajar atau sah-sah saja.
- 5) Kondisi (4) itu akan sama seperti di Kamerun (Echu, 2004: 19-33; Nkwetisama, 2017: 106-114. Pada bagian abstraknya dikatakan bahwa lebih dari 285 bahasa asli Kamerun mungkin hancur oleh bahasa Inggris. Sekitar 40 yang saat ini sedang digunakan dalam pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di sana. Tollefson dalam Nkwetisama (2017: 106-114) mengungkapkan bahwa di AS dan di Australia dengan posisi bahasa Inggris yang unggul telah berkontribusi terhadap kepunahan bahasa-bahasa pribumi, sehingga merampas hak-hak pribumi, hak-hak komunikatif, dan hak-hak istimewa setempat.

2. Politik bahasa Indonesia di Era Glolablisasi dan MEA

Kondisi yang ada:

- 1) Pemakaian bahasa tidak merata di dunia global (Radhakrishnan dalam Pennycook 2010:65).
- 2) Perlu politik bahasa dalam menghadapi globalisasi dan MEA (Phillipson&Skutnabb-Kangas dalam Pennycook, 2010: 65).
- 3) Perlu mikro-politik dalam kehidupan sehari-hari, yakni tentang politik identitas (.Janks,2010: 41)
- 4) Fakta di Kamerun sama dengan di negara-negara Afrika Sub-Sahara, yakni bahasa dianggap sekunder atau kurang penting untuk dianggap agak serius (Echu, 2004: 19-33)
- 5) Kendala yang Malaysia hadapi adalah kesulitan dalam mencari padanan kata/istilah yang paling tepat karena kekurangan kosakata dalam bahas Melayu (Ishak, 2015: 42-49).
- 6) Pemerintah RI lebih mementingkan aspek lain dibandingkan dengan bahasa: Permenaker No. 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Bab V: Persyaratan TKA, Pasal 26, Ayat 1d: dapat berkomunikasi BI. Diganti Permenaker No. 16/ 2015 Menaker, Hanif D.: tujuannya investasi tidak terhambat, banyak perusahaan mengeluh syarat tersebut, sehingga urung berinvestasi di RI. Kompas. Com (2015)
- 7) PP RI No.57/2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi BI. Pada Bab V, Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pasal 20,(1) Warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di RI /akan menjadi warga negara RI harus memiliki kemampuan ber-BI sesuai dengan standar kemahiran ber-BI yang dipersyaratkan. (2) WNA yang belum memenuhi standar kemahiran ber-BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pembelajaran untuk meraih kemampuan ber-BI.”
- 8) Penolakan Waka Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron (Liputan6.com, 2018-3-6): dan Ketua Komisi IX DPR, D. Yusuf: (Trimbun-news.com, 2015-8-24). Kajur Pendidikan Bahasa FIB, Unsoed, Subandi (Tempo.Co, 22 2016-1-22).
- 9) Bahasa-bahasa di dunia akan terancam punah karena masyarakat dunia akan menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam dunia bisnis. (Srichampa, 2015:12) yang mengutip UNESCO
- 10) Pemerhati bahasa: “BI, M. Bru-nai, M. Malaysia jadi bahasa ASE-AN”

sebagai bahasa ASEAN (Takari, 2017: 1-10; Defina *et al.* 2015; Takari 2017:6).

3. Dampak Politik bahasa Indonesia di Era Glolablisasi dan MEA

1. Kurangnya penghargaan orang asing terhadap BI. Contoh: TKA Tiongkok berkomunikasi dengan pengunjung lokal menggunakan B.Ingggris (Liputan6com, 2017-12-27).
2. Semakin banyaknya TKA ilegal di Indonesia. Tahun 2016 ada 1.383 orang. Pelanggaran: TKA yang bekerja tanpa Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebanyak 820 orang (hampir 60%) dan sisanya TKA dengan penyalahgunaan jabatan (Kemenaker, 2016).
3. Terjadi salah komunikasi. "Tenaga kerja lokal terlibat perkelahian dengan tenaga kerja asing di pertambangan nikel Bondoala, Kendari." (Liputan6.com, 2017-3-7)

4. Politik bahasa negara anggota MEA

1. Vietnam: terus meningkatkan keahlian dan kemampuan berbahasa asing tenaga kerjanya. (English.news.cn, 2015)
2. Thailand: pekerja asing mempelajari bahasa Thai, sebagai bahasa masyarakat Thailand. Penguasa atau pemilik usaha tetap menggunakan bahasa Thai dalam berkomunikasi dengan pekerjanya yang datang dari luar Thailand. (Srichampa, 2015:10). Penduduknya sudah banyak yang terampil dalam bahasa asing, seperti Inggris (Virasin, 2014) Thailand emberikan keterampilan bahasa negara-negara tetangganya (ASEAN) dalam pendidikan untuk mempersiapkan angkatan kerjanya (ICEF Monitor, 2013).
3. Malaysia, sejak merdeka, tahun 1957, pemerintahannya menyatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa resmi dan digunakan untuk bahasa

pemerintahan dan pen-didikan untuk semua tingkatan pendidikan. Pada tahun 2002, pe-merintahnya mengumumkan pem-balikan kebijakan, menjadikan B. Inggris sebagai media semua aktivitas (Gill, 2005: 241-260).

PENUTUP

1. Politik BI di antara bahasa-bahasa daerah dan asing mestilah semakin diperkuat dengan terus menyosialisasikan pemakaian BI, terutama dalam pemberian nama.
2. Di era glolablisasi dan MEA ini perlu ditingkatkan politik BI dengan adanya kerja sama dengan negara-negara ASEAN yang memiliki bahasa serumpun.
3. Dampak politik BI di era glolablisasi dan MEA menghambat penginternasionalan BI.
4. Politik bahasa negara anggota MEA berbeda dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, MB. (2012). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chang, W. (2014). *Metodologi Penulisan Ilmiah: Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga
- Defina *et. al.* (2015). Bahasa Melayu-Indonesia (MELINDO): Identitas ASEAN. Dalam *Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX (SALPBM)*, 3 dan 4 November 2015, Fakulti Bahasa Moden&Komunikasi, Universiti Putra Malaysia Upm Serdang, Selangor, h. 416-423.
- Echu, G. (2004). The Language Question in Cameroon. *Linguistik onli-ne*, Vol. 18, No.1, 19-33. <http://www.linguistik-online>. (2018-1-8)
- [English.news.cn]. (2015-11-15). News Analysis: ASEAN Economic Community to bring opportunities, challenges to Vietnam. <http://www.xinhuanet.com>(2018-3-13).
- Fahrurrozi dan Wicaksono, A. (2017). *Sekilas tentang Bahasa Indonesia Catatan Mengenai Kebijakan Bahasa, Kaidah Ejaan, Pembelajaran Sastra, Penerjemahan, dan BIPA*. Yogyakarta: Garudhawacana.
- Gill, S.K. (2005). Language Policy in Malaysia: Reversing Direction, link.springer.com . Volume 4, *Issue 3*, pp 241–260, <https://link.springer.com>(2018-3-20)
- Holmes, J. (2013). *An Introduction to Sociolinguistics*. Fourth Edition. London: Routledge.

- [Hukumonline.com]. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. www.hukumonline.com (2018-1-18)
- Ishak, M.I. (2015). Bahasa Melayu Bahasa ASEAN dalam Pelbagai Disiplin Ilmu. *Prosiding Seminar Antarbangsa Linguistik & Kebudayaan Bahasa Melayu IX: Bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN*. Selangor: UPM bekerja sama dengan Dewan Bahasa dan Ustaka, 42-49.
- Janks, H. (2010). Language, Power and Pedagogies. Dalam *Sociolinguistics and language Education*. Nanci H. Hornberger and Sandra Lee McKay, editor. Salisbury, UK: Short Run Press, 40-61.
- Krishandini dan Defina. (2013). Peranan bahasa terhadap penamaan tempat di Bogor. Dalam *Prosiding Seminar Internasional Linguistik Transdisipliner*. Depok: Departemen Linguistik, FIPB, UI.
- [Monitor. ICEF. Com]. (2013 Mei 24). Opportunities await foreign educational providers as Thailand prepares for ASEAN Community. <http://monitor.icef.com/2013/05> (2018-3-20)
- Nkwetisama, C.M. (2017). Rethinking and Reconfiguring English Language Education: Averting Linguistic Genocide in Cameroon. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 6(6): 106-114, <http://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/3517/2878> (diakses 8 Januari 2018)
- Pennycook, A. (2010). Nationalism, Identity and Popular Culture. Dalam *Sociolinguistics and language Education*. Nanci H. Hornberger and Sandra Lee McKay, editor. Salisbury, UK: Short Run Press, 62-88.
- "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah." <http://www.jdh.setjen.kemendagri>. (2018-5-16)
- "Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing". <http://jogjapro.go.id> (2015-9-7).
- "Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing" <http://tka-online.kemnaker.go.id> (2018-5-3).
- [Kompas.com]. (2015 Februari 16). Alasan Menaker Hapus Syarat TKA Bisa Berbahasa Indonesia. <http://ekonomi.kompas.com/read/2> (2018-1-23).
- [LIPI]. (2017 Juli 14). Kajian LIPI, Banyak Celah Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. <http://lipi.go.id> (2018-1-23)
- (2016 Agustus 05). 139 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. <http://lipi.go.id/lipimedia> (2018-1-16).
- [Liputan6.com]. (2017 Maret 7). Enam plus: Tenaga Kerja Asing Berkelahi dengan Tenaga Kerja Lokal. <http://video.liputan6.com> (2018-1-23).
- (2017 Des27). Banyak Tenaga Kerja Tiongkok Piknik ke Wisata Air Lahat. <http://regional.liputan6.com> (2018-1-23).
- (2018-3-6). DPR Kritisi Pencabutan Permen ESDM tentang Tenaga Kerja Asing. <http://news.liputan6.com> (2018-3-12).
- [Tribunnews.com]. (2015 Agustus 24). Pemerintah Langgar UU Jika Hapus Syarat Pekerja Asing Wajib Berbahasa Indonesia. <http://www.tribunnews.com/nasional> (2018-3-8).
- Srichampa, S. (2015). Globalisation and the Language Situation in Thai-land. Dalam *Language and Linguistics*, January, 1-23. <https://www.researchgate.net> (2018-2-8).
- [Kemdikbud]. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi V. Jakarta: Aplikasi Luring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia.
- (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Takari, M. (2017 Des 25) . Bahasa Melayu dalam Konteks MEA. *Makalah pada Seminar Bahasa Melayu Sebagai Bahasa ASEAN*. Bangkok, <https://www.researchgate.net> (2018-4-3)
- [Tempo.co]. (2016 Januari 22). Era MEA, Bahasa Indonesia Berpeluang Jadi Bahasa Utama ASEAN. <https://bisnis.tempo.co> (2018-5-3).
- (2017 Oktober 26). Ada aturan wajib gunakan bahasa Indonesia di Sumut. <https://nasional.tempo.co> (2018-5-16).
- Virasin, R. (2014 Agustus 8). ASEAN Economic Community and Thai Labor. <https://www.siam-legal.com> (2018-3-13).
- Warami, H. *et al.* (2014). Politics of language in the ACT regulating matters pertaining to specific autonomy for Papua: Critical discourse perspective. *e-journal of linguistics*. Vol. 8, No. 1, 1-11. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eol/article/view/9743/9602> (2018-1-8).